

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian sebagaimana yang dipaparkan pada Bab IV, dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

##### a. Situasi Problematik Kebijakan PSDA di kota Semarang

Situasi problematik tentang kebijakan PSDA di kota Semarang pada enam dimensi: politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum adalah sebagai berikut:

No.	DOMAIN	DESKRIPSI
1	Politics	Kebijakan SDA dan/atau DAS parsial dan tidak terkoneksi satu sama lain Tidak ada kesinambungan kebijakan SDA dan/atau DAS nasional dengan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Dewan SDA nasional hanya badan fungsional untuk koordinasi tetapi tidak punya kewenangan struktural. Potensi kegagalan sangat besar karena tidak ada kesatuan tujuan dan agenda publik Potensi substitusi tujuan kebijakan PSDA dan/atau DAS dengan kebijakan daerah berbasis muatan dan kepentingan lokal sangat besar. Belum ada jejaring kebijakan lintas wilayah administrasi dan lintas sektoral
2	Economics	Eksplorasi nilai ekonomi dan sosial SDA dan DAS secara berlebihan dengan mengorbankan integritas DAS, kualitas dan daya dukung lingkungan Banyak anggaran terbuang hanya untuk mengurangi atau memulihkan kerusakan Nilai ekonomi DAS sudah menurun karena penurunan fungsi jasa ekosistem Kekurangan anggaran untuk menata kembali atau memulihkan kembali struktur dan fungsi DAS yang rusak dan menurun

		Ada peluang menggali sumber pendanaan baru melalui pajak lingkungan dengan prinsip “user pays principles” dan “polluter pays principles”
3	<b>Social</b>	Hambatan koordinasi vertikal dan horisontal. Perlu kolaborasi lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi Partisipasi pemberdayaan komunitas untuk dalam PSDA Pembentukan Dewan PSDA kota dan jejaring kebijakan PSDA
4	<b>Technology</b>	Teknologi yang digunakan untuk membangun infrastruktur air perkotaan masih konvensional Perlu inovasi teknologi IPAL tepat guna dan penerapan lubang Resapan Biopori
5	<b>Legal</b>	Terdapat ketidakjelasan, inkonsistensi, dan disharmoni peraturan perundang-undangan di bidang PSDA dan PDAS sehingga menimbulkan kesulitan dalam membuat kebijakan Perlu membuat legal framework PSDA perkotaan terpadu
6	<b>Environment</b>	Sub-DAS Sungai Kaligarang tercemar oleh limbah B-3 Aluminium Ancaman ketidakberlanjutan SDA dan banjir karena sedimentasi

Sumber: Hasil penelitian (2020)

#### **b. Tantangan/Kendala Formulasi Kebijakan PSDAPT di kota Semarang dan Solusinya**

Terdapat 14 tantangan/kendala dalam merumuskan kebijakan PSDAPT yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang, hasilnya dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Tantangan/ Kendala</b>	<b>Solusi</b>
1	Kesepakatan PSDAPT dlm konteks <i>green growth</i> , <i>green economy</i> , dan SDGs	Membuat kesepakatan baru mengenai <i>green growth &amp; green economy</i> sbg. strategi untuk merealisasikan SDGs
2	Disorientasi, Diskoneksi & Disharmoni kebijakan (3D)	Internalisasi isu-isu <i>green growth</i> , <i>green economy</i> dan SDGs da-lam agenda kebijakan PSDA
3	Pergeseran paradigma PSDA	Menerapkan pendekatan sistem tekno-sosio-ekologis dalam memformulasikan serta mengimplementasikan kebijakan PSDA
5	Fragmentasi & koordinasi	- Menerapkan Joined Up Government atau Whole of Government (WoG) dlm formulasi & implementasi kebijakan PSDA

		- Menerapkan kolaborasi lintas sektor ber-basis kemitraan
6	Informasi	Membuat database dan platform sistem informasi PSDA untuk untuk basis formulasi kebijakan dan mengambil keputusan intervensi
7	Manajemen Pengetahuan	Menyelenggarakan pendidikan & pelatihan ASN untuk mempraktikkan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan tugas
8	Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun area re-sapan &amp; tangkapan air hujan dan limpasan (<i>storm water</i>)</li> <li>- Instalasi Lubang Resapan Biopori (LRB)</li> <li>- Membangun kolam retensi, embung, waduk, dll</li> <li>- Penghijauan lahan hutan, lahan kritis dan tepian DAS</li> <li>- Membuat hujan buatan</li> <li>- Desalinasi air laut</li> </ul>
9	Penurunan cadangan ABT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat kebijakan &amp; legal framework ABT yang terintegrasi dlm paket kebijakan PSDA</li> <li>- Membuat regulasi pemanfaatan ABT</li> <li>- Menyusun skema perijinan yang terintegrasi dengan PSDA</li> <li>- Pengawasan dan kontrol ekstraksi ABT</li> <li>- Penegakan hukum</li> </ul>
10	Degradasi DAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kebijakan &amp; legal framework PDAS yang terintegrasi dengan PSDA</li> <li>- Restorasi DAS</li> <li>- Normalisasi, konservasi &amp; preservasi DAS</li> <li>- Pengawasan &amp; kontrol pencemaran melalui perijinan</li> <li>- Penanganan sampah &amp; sedimentasi</li> <li>- Pemberdayaan komunitas Peduli Sungai</li> <li>- Perubahan perilaku &amp; budaya pemanfaatan DAS</li> <li>- Penerapan PPP &amp; UPP</li> <li>- Penegakan hukum</li> </ul>
11	Pembiayaan PSDAPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun skim pembiayaan PSDAPT dari APBN/APBD dan non APBN/APBD.</li> <li>- Menggali sumber anggaran di luar APBN/APBD.</li> <li>- Mengusulkan kebijakan fiskal berbasis PPP dan UPP kepada pemerintah pusat untuk membagi beban pembiayaan PSDAPT dg. pengguna dan pencemar</li> </ul>
12	Perubahan Iklim dan Pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitigasi &amp; adaptasi perubahan iklim</li> <li>- Pengawasan &amp; Kontrol pencemaran</li> </ul>
13	Erosi tanah & sedimentasi lumpur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kebijakan &amp; <i>legal framework</i> yang terintegrasi dgn PSDA</li> <li>- Penertiban tataguna lahan di area DAS dan lahan tutupan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetasi dan penghijauan hutan, DAS dan area lahan tutupan</li> <li>- Pengawasan &amp; kontrol atas kegiatan pertanian dan pencemaran</li> <li>- Penerapan PPP &amp; UPP</li> </ul>
14	Kondisi politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat <i>legal framework</i> yang komprehensif dan dapat menjamin keberlanjutan kebijakan, perencanaan dan program kerja jangka panjang</li> <li>- Ramifikasi regulasi dg. membuat peraturan di bawah undang-undang yang dapat menjadi antarmuka (interface) berbagai undang-undang di atasnya</li> </ul>

**c. Strategi Umum (*Grand Strategy*) Kebijakan PSDAPT di Kota Semarang**

Strategi kebijakan PSDAPT di kota Semarang terdiri dari dua kluster strategi yaitu: (1) Kluster Strategi Konvensional – Strategi untuk jangka pendek yaitu dengan memberikan nilai tambah pada pengguna serta memberikan suplai air yang cukup dan layak bagi pengguna; (2) Kluster Strategi Ofensif/Inovatif – Strategi untuk jangka menengah dan panjang yaitu dengan melakukan konservasi lingkungan dan struktur air eco-sustainable, serta inovasi teknologi, jejaring kebijakan kolaboratif.

**d. Model Konseptual Jejaring Kebijakan PSDAPT Kota Semarang**

Model konseptual jejaring kebijakan PSDAPT tekno-sosio-ekologis dengan pendekatan infrastruktur air berbasis lingkungan berkelanjutan *Eco-Sustainable Water Infrastructure* (ESWIN) yaitu eksternalitas, situasi problematik dan tantangan PSDAPT di Indonesia, serta Rumusan strategi kebijakan PSDAPT hasil analisis SWOT dan QSPM.

## 5.2. Saran-Saran

Berdasarkan beberapa simpulan penelitian sebagaimana yang dipaparkan di atas, dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

### a. Kepada Pemerintah Kota Semarang

- 1) Memastikan bahwa kebijakan dan strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan dapat memfasilitasi pelaksanaan PSDAPT di kota Semarang, dan didukung oleh skema pembiayaan akuntabel, penerapan teknologi tepat guna, serta dilengkapi dengan tool untuk pengambilan keputusan.
- 2) Menginternalisasikan isu-isu eksternal (eksternalitas) seperti SDGs, *green growth & green economy*, *global water partnership* (GWP), PPP dan UPP di dalam agenda kebijakan publik kota Semarang.
- 3) Mengagendakan mitigasi dan adaptasi perubahann iklim di dalam kebijakan, stratefi dan perencanaan PSDAPT
- 4) Mengatasi hambatan fragmentasi dan koordinasi di berbagai level administrasi
- 5) Meresolusikan konflik kepentingan terkait PSDA baik sevara vertikal maupun horisaontal.
- 6) Menggali sumber pendanaan non APBN/APBD untuk membiayai penyelenggaraan PSDAPT.

### b. Kepada Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Moedal

- 1) Menyusun perencanaan investasi pembuatan IPAL guna mendaur ulang limbah lumpur.

- 2) Membuat Rencana Anggaran Biaya pembangunan IPAL pendaaur ulang lumpur.
- 3) Mengajukan usulan kepada pemerintah Kota Semarang untuk membangun IPAL pendaaur ulang lumpur.